

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Literatur

- A. Mukthie Fadjar, **Teori-teori Hukum Kontemporer**, Setara Press, Malang, 2012.
- Abdul Azis Dahlan, **Ensiklopedi Hukum Islam**, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1996.
- Abdul Manan, **Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia**, Kencana, Jakarta, 2012.
- Ahmad Rifai, **Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Angga Permana, **Pembatalan Perkawinan Menurut UU No.1 Tahun 1974 Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Perbandingan Hukum Tentang Kedudukan Anak Dan Harta Kekayaannya)**, Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2012.
- Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Chidir Ali, **Badan Hukum**, P.T Alumni, Bandung, 2005.
- Dahlan Hasyim, **Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan**, Jurnal Sosial-Pembangunan, Vol 23, Universitas Islam Bandung, 2007.
- Denny Indrayana, **Negara Antar Ada dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraan**, Kompas, Jakarta, 2008.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1997.
- Hamdan Zoelva, **Pemakzulan Presiden di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Haryatmoko, **Etika Publik Untuk Integritas Pejabat Publik Dan Politisi**, Gramedia, Jakarta, 2011.
- Hilman Hadikususma, **Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama**, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Jimly Asshiddiqie, **Perihal Undang-Undang**, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Jimly Asshiddiqie dan Ali Syafa'at, **Teori Hans Kelsen Tentang Hukum**, Konstitusi Press, Jakarta, 2012.

Jimly Asshiddiqie, **Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi**, Sekjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006.

Johny Ibrahim, **Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2006.

K. Wantjik Saleh, **Uraian Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan**, Ichtiar Baru, Jakarta, 1975.

Khoiruddin Nasution, **Hukum Perkawinan Islam (Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer)**, ACAdenMIA dan TAZAKKA, Yogyakarta, 2005.

Khunti Dyah Wardani, **Impeachment dalam Ketatanegaraan Indonesia**, UII Press, Yogyakarta, 2007.

Komariah, **Hukum Perdata**, UMM Press, Malang, 2013.

M. Yahya Harahap, **Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Meiki Arizona, **Analisis Yuridis Pengaturan Pasal 2 Ayat (1) Dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, Tesis tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2012.

Muhammad Bahrul Ulum, **Mekanisme Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden Menurut UUD 1945 (Antara Realitas Politik dan Penegakan Konstitusi)**, Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 4, Sekjen dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta, 2010.

Neng Djubaidah, **Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatatkan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005.

Rossy Novita Khatulistiwa, **Uji Materiil Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan : Implikasi Terhadap Sistem Keluarga di Indonesia**, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013.

R. Soetojo Prawirohamidjojo, **Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia**, Airlangga University Press, 2006.

Rachmadi Usman, **Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Rimba Supriatna, **Politik Hukum Pemakzulan Kepala Daerah Di Era Otonomi Daerah**, Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2012.

Trusto Subekti, **Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian**, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 3, 2010.

Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 P/Khs/2013.

Internet

Tim Liputan Indosiar, 2012, **Pemakzulan Bupati Garut**, diunduh dari <http://www.indosiar.com/fokus/kronologis-kasus-aceng-fikri.html>

Masnun Tahir, 2010, **Meredam kemelut Kontroversi Nikah “siri” (Perspektif Maslahah)** online, diunduh dari journal.uii.ac.id/index.php/JHI/article/view/2865/2621

Dinoroy M. Aritonang, **Pengertian Pejabat Negara**, 2012, diunduh dari www.stialanbandung.ac.id